

Ulama' Pesantren dan Kekuasaan

Dr. Mohammad Nasih

nasih_ui@yahoo.com

Prodi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRAK

Pilihan peran ulama' bisa dihubungkan dengan perspektif tentang relasi agama dan politik. Ada tiga perspektif tentang hubungan antara agama dengan politik, yaitu: menyatukan keduanya (integralistik), memisahkan antara keduanya (sekularistik), dan menjadikan agama sebagai landasan moral etik untuk politik (substansialistik). Di dalam pola relasi integralistik dan substansialistik, mudah dipahami bahwa agama harus ditransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan politik yang dibuat. Namun, bukan berarti bahwa dalam negara yang menggunakan pola relasi yang sekularistik, agama tidak bisa ditransformasikan. Tulisan akan menguraikan ketiga perspektif relasi agama dan politik. Penggalan data didasarkan pada studi pustaka. Data kemudian dianalisa secara filosofis.

Kata Kunci: Ulama, Pesantren, Agama, Politik

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar agama Islam di bawah kepemimpinan ulama' (bisa disebut kiai, ajengan, tuan guru, atau yang lain). Secara fisik, biasanya pesantren identik dengan bilik-bilik yang khas. Karena itulah muncul istilah pondok pesantren. Kata pondok berasal dari bahasa Arab funduq, berarti penginapan. Istilah itu digunakan berdasarkan fungsi pondok yaitu tempat untuk menginap para santri, terutama yang datang dari jauh, yang ingin memfokuskan diri mendalami ilmu kepada kiai (Kompri, 2018).

Karena itulah, walaupun lingkungan pesantren terbatas, tetapi sesungguhnya ia memiliki jangkauan pengaruh yang luas ke dalam masyarakat. Sebab, keberadaan sebuah pondok pesantren tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan masyarakat kepada seorang ulama' yang

memimpinnya, bahkan itulah basis utamanya. Karena kepercayaan itulah, mereka mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar agama kepadanya. Hanya apabila terdapat santri yang tinggal bersama dengan ulama', maka tempat itu disebut sebagai pondok pesantren. Keberadaan santri yang mondok tersebut, di banyak pesantren menjadi daya tarik yang lebih kuat bagi masyarakat sekitar lingkungan pondok pesantren untuk menjadi "santri kalong", yaitu santri yang setelah mengikuti pengajian, pulang ke rumah masing-masing. Istilah "kalong" digunakan karena santri yang demikian memiliki di antara ciri yang sama. Kalong adalah sejenis kelelawar yang keluar untuk mencari makan, lalu kembali lagi ke sarangnya. Santri kalong adalah santri yang keluar rumah untuk mengaji untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan setelah pengajian usai kembali lagi ke rumah, tidak menginap di bilik-bilik pesantren sebagaimana santri-santri yang pada umumnya berasal dari daerah yang jauh (Mujamil Qomar, t.th., hal. 1-2).

Karena memiliki basis yang kuat di masyarakat, ulama' pesantren memiliki pengaruh yang cukup besar. Dalam berbagai kesempatan, karena dianggap memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dan retorika yang menarik, sebagian ulama' juga diundang untuk memberikan

ceramah-ceramah dalam berbagai acara, di antaranya halal bi halal, hafiah akhir tahun, maulid nabi, nuzul al- Qur'an, bahkan pernikahan dan sunatan. Dalam acara-acara tersebut, pengaruh para ulama' makin kuat dalam masyarakat (Baca juga Abdurrahman Wachid, 2001, hal. 3-4, Lihat juga Greg Barton, 2003, hal. 118-119)

Pengaruh yang kuat dalam masyarakat ini membuat ulama' memiliki posisi tawar yang kuat dalam politik. Hanya saja, mereka menggunakan daya tawar itu secara beragam.

Kekuasaan yang dimiliki oleh ulama' pesantren bisa dilihat dengan menggunakan perspektif kekuasaan kultural dan kekuasaan struktural. Ulama' dengan pengaruhnya yang mengakar di dalam masyarakat sesungguhnya memiliki kekuasaan. Sebab, pengaruh itu bisa digunakan untuk mengarahkan masyarakat yang merupakan inti kepemimpinan. Sedangkan ulama' pesantren yang juga menjalani aktivitas politik dan memiliki jabatan politik berarti memiliki kekuasaan ganda, yakni kultural dan struktural sekaligus.

Pilihan peran ulama' bisa dihubungkan dengan perspektif tentang relasi agama dan politik. Ada tiga perspektif tentang hubungan antara agama dengan politik, yaitu: menyatukan keduanya (integralistik),

memisahkan antara keduanya (sekularistik), dan menjadikan agama sebagai landasan moral etik untuk politik (substansialistik). Di dalam pola relasi integralistik dan substansialistik, mudah dipahami bahwa agama harus ditransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan politik yang dibuat. Namun, bukan berarti bahwa dalam negara yang menggunakan pola relasi yang sekularistik, agama tidak bisa ditransformasikan. Abdullahi Ahmad An-Na'im bahkan mengajukan jalan untuk menegosiasikan syari'ah ke dalam kebijakan politik di negara sekuler sekalipun. Jalan yang dimaksud oleh An-Na'im adalah objektifikasi ajaran Islam yang kemudian dijadikan sebagai muatan dalam kebijakan politik. Sesungguhnya ini juga mirip dengan hasil kebijakan politik dalam pola relasi substansialistik. Sebab, yang ditekankan adalah substansinya, bukan formalitasnya (Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2007, hal. 213).

Indonesia bukan negara yang menganut pola integralistik, juga bukan sekularistik. Awalnya ada lima agama, tetapi kemudian ditambah Konghucu, pada era Gus Dur menjadi presiden RI, yang diakui sebagai agama resmi. Karena itulah, Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara-bangsa yang religius (religious nation-state) (Mohammad Nasih, *Dinamika antara Islam dan Nasionalisme di Turki dan Indonesia*, seri disertasi).

Dalam konteks konstruksi negara yang demikian itulah, ulama' memiliki tanggung jawab untuk melakukan transformasi agama ke dalam kehidupan politik. Tanggung jawab itu ada karena ulama'lah yang paling mengetahui pesan-pesan paling substansial di dalam kedua sumber ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.

Ditambah lagi dengan sejarah negara Indonesia merdeka oleh perjuangan umat Islam yang dipimpin oleh para ulama'. Karena itulah, tidak sedikit ulama' yang kemudian berkiprah di dalam politik sebagai wujud tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan yang telah berhasil diraih dengan ide dan aksi sendiri (Khamami Zada & A Fawaid Syadlili, 2010, hal. 20-21).

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana ulama' memosisikan diri terhadap kekuasaan? Apa yang menyebabkan mereka menjatuhkan pilihan pada posisi tersebut?

PEMBAHASAN

Sejarah awal Islam merupakan sejarah tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad saw. secara kultural an sich di Makkah selama tiga belas tahun. Perjuangan dakwah tersebut kemudian dilanjutkan dengan dakwah kultural dan politik sekaligus di Madinah selama sepuluh tahun. Fase dakwah di Makkah

menjadi fase yang sangat berat, karena Islam sebagai *din* baru tidak diterima oleh terutama para elitnya. Sesungguhnya, itu terjadi lebih disebabkan oleh ketakutan mereka akan kehilangan pengaruh dalam masyarakat (Baca Martin Lings, 2007 dan Lesley Hazleton, 2013).

Model dakwah Nabi itulah yang sesungguhnya menjadi rujukan para ulama' sebagai yang mewarisi para nabi (*waratsat al-anbiyaa'*). Namun, di kalangan pesantren, tidak sedikit yang menganggap bahwa politik merupakan wilayah yang mesti dihindari. Sebab, politik dianggap sebagai sumber konflik, baik antar sesama elite politik, elite dengan masyarakat akar rumput, maupun sesama masyarakat akar rumput. Sementara pesantren harus menjaga hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pandangan dan sikap ulama pesantren terhadap politik secara umum terbagi menjadi sebagai berikut:

Pertama, memandang bahwa politik merupakan bagian integral dalam Islam. Dan karena memiliki rasa tanggung jawab untuk mentransformasikan ajaran Islam menjadi kebijakan politik, maka ulama' terjun langsung ke dalam politik dengan mengikuti kontestasi untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui pemilu.

Kebutuhan kepada dukungan elektoral dalam Pemilu membuat ulama' politisi harus membangun berbagai strategi dengan menjadikan pesantren yang dipimpin sebagai basis utama. Dua yang paling umum dilakukan adalah membangun jaringan dengan para kiai kampung/desa dan membangun jalinan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Di antaranya karena kebutuhan inilah perjudohan antara sesama anak orang-orang berpengaruh dalam agama dan politik ini dilakukan.

Kiai kampung/desa adalah sebutan untuk imam masjid desa yang pada umumnya pernah belajar di pesantren, baik sebagai santri yang mondok maupun santri kalong. Kiai kampung biasanya tetap menjalin patronase dengan ulama' pesantren, karena mereka sangat membutuhkan rujukan dalam berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan keseharian. Pada umumnya mereka tidak memiliki keberanian untuk memberikan keputusan, bahkan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sesungguhnya banyak rujukan analogisnya, atau pernah terjadi sebelumnya. Karena itulah, hubungan antara ulama' pesantren dengan kiai kampung terbangun secara mutualistis. Kiai kampung selalu mendapatkan jawaban jika terdapat persoalan yang diajukan oleh masyarakat akar rumput.

Sedangkan ulama' pesantren memiliki simpul massa yang dalam Pemilu diperlukan untuk melakukan mobilisasi pemilih untuk memberikan dukungan elektoral.

Jalinan kekeluargaan bisa dijalin dengan dua cara. Ada kalanya dengan sesama ulama' pesantren yang berafiliasi kepada partai politik yang sama. Ada kalanya juga dengan kiai kampung yang memiliki pengaruh paling besar. Dengan jalinan pernikahan itu, jaringan politik di antara mereka menjadi semakin kuat. Karena kebutuhan itulah, tidak jarang di antara proses pernikahan terjadi dalam nuansa paksaan.

Kedua, memandang bahwa politik adalah bagian integral di dalam Islam, tetapi ulama' pesantren menyadari tidak memiliki ketrampilan dan/atau persyaratan formal yang diperlukan untuk menjadi pejabat politik. Mengenai persyaratan formal ini, awalnya banyak ulama' pesantren yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki ijazah formal minimal SMU sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab, rata-rata pesantren awalnya tidak mengakomodasi kurikulum yang ditentukan oleh negara. Karena itu, terjun ke dalam politik tetap dilakukan, tetapi hanya sebagai pendukung pihak lain yang menjadi kontestan Pemilu. Yang didukung bisa sesama ulama' pesantren, bisa juga politisi

yang bukan ulama' pesantren, bahkan tidak memiliki latar belakang sama sekali sebagai santri, tetapi memiliki hubungan yang baik. Hubungan baik itu juga bermacam ragam bentuk, mulai dari hubungan kekeluargaan yang dijalin, sampai hubungan saling dukung untuk kepentingan elektoral dan finansial.

Dalam pola hubungan ini, ulama' yang memiliki idealisme politik bisa menitipkan substansi ajaran Islam kepada politisi yang ia dukung. Tentu saja, upaya ini tidak bisa seefektif yang pertama. Sebab, politisi yang mendapatkan amanah untuk memasukkan substansi ajaran, belum tentu memahaminya dengan baik, atau merasa tidak begitu memerlukannya, atau bahkan memiliki kepentingan yang justru berbeda. Jika gagasan politik tersebut tidak diperjuangkan oleh politisi, maka ulama' harus menerima kenyataan tersebut. Jika mampu melakukannya, maka hubungan dengan politisi akan tetap baik. Namun, jika tidak, maka hubungan akan menjadi kurang harmonis.

Ketiga, netral dengan menjaga hubungan dekat kepada seluruh partai politik. Dalam masyarakat yang antipati kepada politik, sikap netral ini justru sering mendatangkan banyak simpati dari ummat. Ulama' yang memilih sikap ini biasanya justru memiliki banyak pengikut,

karena konstituen banyak partai bisa berpatron dalam pemahaman agama kepada ulama' ini.

Pilihan ini diambil sesungguhnya berdasarkan berbagai kalkulasi, di antaranya: tidak memenuhi persyaratan formal, jika ikut dalam kompetisi belum ada jaminan terpilih, hanya dikenal sebagai ulama' bukan politisi, dan pertimbangan menempati posisi netral justru lebih menguntungkan. Karena itu, pilihan untuk netral sesungguhnya adalah pilihan yang sudah sangat politis dalam konteks sama-sama untuk mendapatkan atau mempertahankan pengaruh dalam masyarakat, sedangkan pengaruh itu, dalam waktu dan konteks tertentu, bisa dikonversi menjadi berbagai macam kebutuhan, termasuk di antaranya adalah kebutuhan finansial. Motif ini sesungguhnya bukan hal baru. Al-Qur'an misalnya telah mengidentifikasi motif ini terjadi pada ulama' Yahudi dan juga Nashrani. *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan*

mendapat) siksa yang pedih." (al-Taubah: 34).

Keempat, netral dengan menolak secara tegas pihak yang memiliki kepentingan politik. Sikap ini dipilih karena dua sebab:

Pertama, menganggap bahwa politik bukan bagian integral dalam Islam. Islam dianggap sekedar ajaran tentang ibadah belaka. Jika pun lebih dari itu hanya berkaitan dengan urusan mu'malah yang terbatas pada urusan jual-beli. Ini terjadi karena kajian fikih yang dilakukan tidak sampai kepada fikih siyaasah (politik). Sementara kajian langsung kepada al-Qur'an tidak dilakukan secara intensif. Karena itulah, paradigma politik kekuasaan yang sesungguhnya sangat tegas di dalam al-Qur'an dan juga sunnah Nabi tidak tertangkap dengan baik.

Kedua, tidak mau ada anasir permusuhan yang biasanya muncul dari politik ke dalam pesantren. Konflik di dalam pesantren menyebabkan suasana harmonis yang diinginkan rata-rata jama'ah terganggu. Padahal mereka memiliki niat utama untuk belajar agama yang dalam pandangan mereka terbatas pada urusan ibadah. Dan ibadah itulah satu-satunya aspek yang akan menjadi bekal untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini.

Di kalangan akar rumput, perbedaan secara umum dianggap

identik dengan permusuhan. Tidak hanya perbedaan yang berkaitan dengan agama, tetapi juga perbedaan pilihan politik. Di Indonesia, itu terjadi karena di masa lalu, baik terutama di masa Orde Baru maupun Orde Lama, terdapat sebuah fase politik yang di dalamnya pertentangan politik terjadi secara sangat tajam. Doktrin-doktrin agama, baik ayat maupun hadits Nabi Muhammad, banyak dieksploitasi untuk membangun dukungan politik. Tidak hanya partai Islam yang mendapatkan justifikasi dari ayat al-Qur'an, tetapi partai lain juga menggunakannya. Karena itulah, politik nampak sebagai penyebab konflik dan perpecahan umat. Perspektif simplistik itulah yang kemudian berpengaruh kepada pilihan untuk menjauhkan politik dari kehidupan sehari-hari umat. Padahal sikap ini, dalam konteks yang sangat luas, justru berpotensi besar membuat umat Islam menjadi terpinggirkan, karena tidak menjadi bagian dari penentu kebijakan politik kenegaraan (Baca juga Ahmad Syafii Maarif, 1996, hal. 82)

PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai simpulan, yaitu:

Pertama, pilihan posisi ulama' pesantren tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap ajaran



Sikap dan pilihan politik ulama' pesantren tidak bisa dilihat secara hitam putih. Pilihan mereka harus dilihat secara komprehensif berdasarkan latar dan motif yang mendasarinya.

Islam, kemampuan atau ketrampilan berpolitik, dan kepemilikan jaringan politik sampai kepada akar rumput. Jika semuanya dimiliki, maka pilihan akan dekat kepada terjun langsung ke dalam perebutan kekuasaan politik. Namun, jika tidak, maka mereka akan memilih untuk hanya menjadi pendukung, atau bahkan sampai secara ekstrem menjauhi politik.

Kedua, ulama' pesantren memiliki jaringan politik yang kuat, karena mereka memiliki kedekatan kepada umat dengan cara memberikan pendidikan, baik pendidikan di pesantren maupun di luar pesantren melalui acara-acara massal, yang diselenggarakan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok.

Ketiga, pilihan untuk terlibat dalam politik disebabkan oleh ke-

butuhan untuk memperjuangkan kepentingan politik umat Islam. Di samping itu, ulama' dengan akses yang besar kepada kekuasaan juga memiliki akses yang besar kepada kapital finansial.

Keempat, pilihan tidak terlibat dalam politik elektoral bukan berarti itu pilihan yang tidak politis. Bisa saja itu sesungguhnya adalah pilihan untuk membangun pengaruh di kalangan masyarakat yang memandang bahwa netralitas politik dalam kondisi politik yang konfliktual adalah lebih mulia. Pilihan untuk netral tersebut sesungguhnya justru merupakan pilihan yang tepat untuk membangun dan memperbesar pengaruh di dalam masyarakat. Padahal pengaruh tersebut bisa terkonversi menjadi kekuatan finansial, baik secara langsung dalam bentuk ummat memberikan shadaqah dan/ atau hadiah kepada ulama', atau pejabat politik memberikannya demi mendapatkan dukungan politik.

Berdasarkan itu, sikap dan pilihan politik ulama' pesantren tidak bisa dilihat secara hitam putih. Pilihan mereka harus dilihat secara komprehensif berdasarkan latar dan motif yang mendasarinya. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 2007. *Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan.
- Barton, Greg. 2003. *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS.
- Hazleton, Lesley, 2013. *The First Muslim: The Story of Muhammad*, New York: Riverhead Books.
- Kompri, 2018. *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lings, Martin, 2007. *Muhammad Rasulullah, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, Jakarta: Serambi.
- Maarif, Ahmad Syafii, 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Jakarta: Gema Insani,
- Qomar, Mujamil, tt. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi*. Institusi, Jakarta: Penerti Erlangga.
- Wachid, Abdurrahman, 2001. *Menggerakkan Tradisi: Essai-essai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.
- Zada, Khamami & A Fawaid Syadlili, 2010. *Nahdlatul Ulama': Dinamika Ideologi dan Kenegaraan*, Jakarta: Kompas.